

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN NEGERI SEMARANG
KELAS IA KHUSUS**



PENGADILAN NEGERI SEMARANG



PENGADILAN NEGERI SEMARANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NOMOR : W12.U1/ 128 /OT.07.01/ 1/ 2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS IA KHUSUS

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS IA KHUSUS

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Semarang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Niaga/HI/TIPIKOR Semarang Kelas IA Khusus tanggal 29 Mei 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri/Niaga/HI/TIPIKOR Semarang Kelas IA Khusus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS IA KHUSUS TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS IA KHUSUS.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri/Niaga/HI/TIPIKOR Semarang Kelas IA Khusus agar tetap memiliki IKU

yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2021


Ketika
Pengadilan Negeri Semarang
Kelas A Khusus

Dr. Agus Rusianto S.H., M.H.
NIP. 19670422 1992121 001


**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HI/TIPIKOR SEMARANG KELAS IA KHUSUS**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jmlperkarayangdiselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu: Perkara Pidana, Perdata selama 5 bulan, GS selama 50 hari, Niaga PKPU selama 45 hari, Niaga Pailit selama 20 hari.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	$\frac{\text{JmlPerkaraYangtidakmengajukanupayahukum}}{\text{Jumlahputusanperkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jml perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index responden pencari keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.		
		a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para Pihak Tepat Waktu		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 tahun 2018 tentang Mediasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	$\frac{\text{JmlPutusanPerkaraPerdataYangDiajukanEksekusi}}{\text{JmlPutusanPerkaraPerdata}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2021



 Pengadilan Negeri/Niaga/H/TIPIKOR Semarang
 Kepala Pengadilan
 DR. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.
 NIP. 19670422 1992121 001